

**Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  
Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka**

*Misbak, S.Ag., M.Si*

*Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon  
2014*

**ABSTRAK**

*Pembangunan masyarakat Indonesia harus terjadi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bentuk pembangunan yang mendasari kesejahteraan masyarakat, ekonomi, politik, sosial budaya, infrastruktur dan lainnya. Untuk menggapai itu diperlukan strategi yang tepat sehingga perubahan pembangunan masyarakat benar-benar dapat terelaisasi. PNPM mandiri dilaksanakan sebagai program penagnggulan kemiskinan dengan metode pemberdayaan masyarakat yang seluruh kehiatannya melibatkan peran serta aktif masyarakat dari tahap m perencanaan, pelaksanaan, pelaporan samapai evaluasi.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. 2). Untuk mengetahui faktor – faktor yang menentukan efektifnya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. 3). Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.*

*Lokasi penelitian dilaksanakan dengan mengambil dilokasi dampingan PNPM Kecamatan Leuwimunding. Penelitian dilaksanakan Bulan Februari sampai dengan Juni 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.*

*Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan sudah dilakukan secara efektif namun belum maksimal sebab pada aspek tertentu masih ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama dilihat dari rencana kerja yang sudah dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaan. Kedua, sasaran dalam PNPM-MP ini adalah masyarakat, namun masyarakat masih ada yang belum mengerti dan memahami sistem kerja PNPM ini. Begitupun dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MP ini masih kurang sehingga aspek penelitian belum tapat sasaran. Yang ketiga dalam pelaksanaan PNPM-MP kurangnya tenaga sumber daya manusia atau pegawai PNPM itu sendiri.*

***Kata kunci : PNPM, Pembangunan Nasional, Leuwimunding-Majalengka.***

---

**PENDAHULUAN**

Pembangunan masyarakat Indonesia harus terjadi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bentuk

pembangunan yang mendasari kesejahteraan masyarakat, ekonomi, politik, sosial budaya, infrastruktur dan lainnya. Untuk menggapai itu diperlukan strategi yang tepat sehingga perubahan

pembangunan masyarakat benar-benar dapat terelaisasi.

Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai itu penataan pembangunan tidak hanya pada sektor tunggal tapi secara menyeluruh terhadap semua komponen pendukung pembangunan nasional. Sektor utama yang mendasari semua sektor yang perlu dibenahi adalah menunjang pemabngunan nasional adalah sektor ekonomi.

Keberhasilan pembangunan nasional, bukan lah pembangunan sektoral atau terpusat, namun pembangunan menyeluruh yang dimulai dari daerah yang merupakan komponen parameter pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pembangunan daerah juga dititikberatkan pada Asas Demokrasi dengan memberikan porsi kepada partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Penyelesaian perngangguran dan kemiskinan seolah menajadi hal yang tak berujung. Permasalahan ini dipicu karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak dimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Manusia Indonesia masih memiliki ketergantungan bekerja pada orang lain, belum banyak yang mempunyai jiwa mandiri dalam memberdayakan dirinya

sendiri. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan merubah *mindset* masyarakat adalah dengan program pemberdayaan masyarakat.

Pada tanggal 12 September 2006 : Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk menetapkan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.

Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa :

“Pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan”.

(Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.2007/2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan sebuah penelitian dengan judul “**Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka**”.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2001: 1) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan semua data di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kemudian dianalisis selanjutnya melakukan perbandingan antara keadaan yang terjadi dan kenyataan yang sebenarnya dan mencari pemecahan masalah dari kesenjangan itu.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi dampingan PNPM Kecamatan Leuwimunding, dengan alasan sebagai berikut:

1. Adanya masalah yang perlu diberi jalan keluarnya
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian dan pembahasan
3. Lokasi penelitian mudah dijangkau

Penelitian ini dilaksanakan Bulan Februari sampai dengan Juni 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini masih tergolong negara miskin, masyarakat masih dikatakan jauh dari kemakmuran, hal tersebut terlihat dari jumlah masyarakat miskin masih tergolong tinggi dan relatif banyak. Angka jumlah kemiskinan tersebut merupakan indikator kemiskinan dan berdampak pada program pembangunan terhambat dan tidak dapat berlangsung apabila negara dalam kondisi tidak stabil. Sementara itu stabilitas nasional sangat tergantung kepada ketentraman masyarakat. Kondisi

yang tenteram akan sangat mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional.

Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan. PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM Mandiri dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM Mandiri dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat sendiri.

Saat ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar disekitar 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang pemanfaat (orang miskin),

melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sementara di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka terdiri dari 9 LKM/BKM dan 59 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

**Tabel 1**  
**Daftar Nama – nama**  
**LKM Kecamatan Leuwimunding**

No	Desa	LKM	Alamat LKM
1	Heuleut	Kuntum Mekar	Blok Kilalawang Rt. 002/Rw. 006 Desa Heuleut
2	Rajawanggi	Rajawanggi	Blok Senin RT 003 RW 002 Desa Rajawang
3	Mindi	Cipta Perwata	Blok Selasa Rt. 002/Rw. 005 Desa Mindi
4	Leuwikujang	Kujang Jaya	Dusun Muara RT 002 RW 001 Desa Leuwikujang
5	Lame	Brenggala	Dusun Sinduparana Rt. 002/Rw. 001 Desa Lame
6	Nanggerang	Yuda Laksana	Dusun Gandalaksana Rt. 001/Rw. 001 Desa Nanggerang
7	Parakan	Rambut	Blok

		Kasih	Senin Rt. 006/Rw. 003 Desa Parakan
8	Tanjungsari	Teratai Tanjungsari	Dusun Panumpangsari Rt. 001/Rw. 003 Desa Tanjungsari
9	Patuana	Pernata Kusuma	Blok Sabtu Rt. 004/Rw. 002 Desa Patuana

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :

1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. Didukung oleh sumber daya yang ada
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan

- masyarakat (pendidikan nonformal).
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
  4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP / Simpan Pinjam Perempuan).  
Di Kecamatan Leuwimunding ada 3 jenis kegiatan TRIDAYA yang meliputi kegiatan lingkungan, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Namun yang terealisasi kegiatan lingkungan dan sosial.

Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan / satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah :

1. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas / keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
2. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil

- verifikasi kelayakan kelompok.
3. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas / ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.
  4. Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga.
  5. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM Perkotaan adalah sebesar Rp 200 juta.
  6. Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.
3. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan

- (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain).
4. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,
  5. Pembiayaan gaji pegawai negeri.
  6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja.
  7. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.
  8. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut.
  9. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang.
  10. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.
  11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
  12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha).
  13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha
  14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Sanksi

bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi dapat berupa :

1. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
2. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perkotaan dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

#### **Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka**

Seiring dengan pelaksanaan PNPM Mandiri, di Kecamatan Leuwimunding termasuk kedalam PNPM Mandiri Perkotaan yang terdiri dari 14 desa. Dengan

kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan, kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki diharapkan akan semakin baik, sehingga berpengaruh pula terhadap peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Indikator atau tolak ukur keberhasilan dari PNPM Mandiri Perkotaan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipatif
2. Jumlah warga miskin bisa menerima manfaat dalam program PNPM Mandiri Perkotaan
3. Kesejahteraan masyarakat
4. Perubahan perilaku masyarakat
5. Meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Selama ini pelaksanaan program PNPM Mandiri tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan penyimpangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding kabupaten Majalengka masih belum efektif , salah satunya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kuwu Desa Leuwikujang, beliau mengatakan :

*“Ti awal aya program PNPM taun 2007 , saacan abdi ngajabat kepala desa Leuwikujang masyarakat kurang paham naon eta PNPM, manfaat na kanggo naon jang urang bisa nguntungkeun ta henteu, tina ngaran PNPM na oge masyarakat seueur nu teu apal kapanjangan nana komo mun titah ngahartikeun, jadi nya*

*masyarakat kurang guyub kumpul partisipasi atawa kumaha lah dina kagiatan PNPM, meren kurang sosialisasi ka masyarakat tentang PNPM”.*

“(Dari awal adanya PNPM tahun 2007 sebelum saya menjabat kepala desa Leuwikujang masyarakat kurang mengerti apa itu PNPM, manfaatnya buat apa buat diri kita apakah menguntungkan apa enggak, dari nama PNPM sendiri masyarakat banyak yang belum tahu kepanjangan dari PNPM apalagi suruh nerjemahin PNPM. Jadinya masyarakat kurang partisipasi dalam kegiatan PNPM, mungkin juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang program PNPM)”.

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Ketua LKM Desa Leuwikujang mengatakan bahwa :

*“Masyarakat banyak yang belum berpartisipasi, gak tau kenapa orang-orangnya pada acuh atau karena gengsi atau apa , padahal sih adanya PNPM itu sangat membantu meningkatnya pembangunan desa, conto na bae disini lebih dititikberatkan pada kegiatan pembangunan sarana jalan gang yang diperbaiki, apa ada masyarakat yang membantu dalam pembuatan jalan teu peduli kabeh, sekarang mah masyarakat mau enak nya aja”.*

Adapun menurut LKM Desa Heuleut mengatakan bahwa :

“Tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dikarenakan beberapa faktor mungkin sibuk sama pekerjaannya sendiri atau ada hal lain yang tidak ikut berpartisipasi pokonya kalo masalah partisipasi belum sepenuhnya 100%”.

Adapun penyampaian informasi ini diakui oleh ketua RT 04/03 Desa Leuwikujang yang mengatakan bahwa :

*“Janten kieu ari partisipasi sih nya pada ikut tapi ngan bisa diukur lah lolobana mah nte aya nu peduli, malah yang ngrjain tukang kabeh, pemuda-pemudi namah boro-boro , teuing tah pemuda-pemudi zaman ayeuna tara aya aktif di kagiatan organisasi”.*

“(Jadi gini kalo partisipasi emang ada tapi berapa persen lah yang peduli kebanyakan yang enggak peduli, malah yang ikut membantu kegiatan tukang semua, pemuda-pemudanya gak ada yang peduli, Gak tau anak muda zaman sekarang kurang aktif dikegiatan organisasi)”.

Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan RW 1 Desa Leuwikujang yang mengatakan :

“Boleh dikatakan kurang partisipasi , karena kurangnya sosialisasi dari perangkat desa setempat ke masyarakat. Harusnya memperkenalkan program PNPM ka masyarakat terutama masyarakat awam bukan ke perangkat desa

nya aja, justru partisipasi masyarakat itu lah yang dibangun berhasilnya kegiatan”.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka**

Secara teoritik ada tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu pelaksanaan program. Menurut Soedjadi (2003 : 37) yaitu ketepatan waktu, pencapaian target atau hasil, kualitas kerja. Masing-masing faktor tersebut dalam kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, menurut Soedjadi (2003 : 37) dalam efektivitas mempunyai tiga dimensi yaitu sebagai berikut :

#### **1. Ketepatan waktu : sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan**

Ketepatan waktu merupakan indikasi seseorang pegawai dikatakan efektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketepatan waktu sangat lah penting untuk mengukur sejauh manakah pelaksanaan sesuai waktu yang di tentukan. Begitu juga halnya pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan oleh pegawai di PNPM-MP Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Adapun yang menjadi parameter dimensi diatas adalah sebagai berikut :

#### **1. Ketepatan pola administrasi dalam perencanaan program**

Administrasi berasal dari kata to administer, yang diartikan sebagai to manage (mengelola). Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan

dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tidak terlepas dari adanya pengelolaan administrasi untuk mencapai tujuan program. Tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu pelaksanaan tidak akan berjalan dengan efektif. Pengertian perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Berikut wawancara penulis meliputi ketepatan pola administrasi dalam perencanaan program dengan KORKAB (Koordinator Kabupaten) PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Majalengka :

“Ketepatan menyusun rencana kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan untuk tingkat desa sangat matang direncanakan, tentunya dalam perencanaan program tergantung dari desa yang mengajukan kegiatan tersebut”.

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara penulis dengan Senior Fasilitator (SF) yang mengatakan bahwa :

“Ketepatan pola administrasi dalam perencanaan program disini misalnya kegiatan infrastruktur, mulai dari perencanaan kegiatan, penyusunan rencana, pembuatan proposal dan lain sebagainya sampai tahap akhir pelaksanaan di Kecamatan Leuwimunding

cukup sesuai prosedur yang telah ditentukan, paling kalo masalah tepat enggaknya administrasi disini tidak tepat waktu”.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Fasilitator PNPM Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, mengenai ketepatan administrasi dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan waktu yang ditetapkan didapat keterangan bahwa penyelesaian pekerjaan oleh pegawai khususnya TIMFAS (tim fasilitator) PNPM-MP Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dalam membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan.

“Ketepatan administrasi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan hal ini dikarenakan tidak tepatnya perencanaan pembuatan LPJ, yang harusnya dalam pelaksanaan kegiatan dibarengi dalam pembuatan LPJ, ini malah penyelesaian LPJ nya setelah kegiatan itu selesai, jadi memperlambat waktu yang ditentukan, dan ini mungkin salah satu tidak tepatnya administrasi”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Kordinator LKM Desa Leuwikujang mengatakan bahwa :

“Masalah ketepatan administrasi dalam perencanaan program misalnya disini paling klo di LKM rencana pembuatan jalan, disini kan harus rebug usulan

sama warga, kemudian pembentukan panitia KSM baru ngajuin proposal, tetapi proposal yang diajukan ke PJOK kecamatan, disini kadang tidak langsung dikasihin dikarenakan proposal yang dibikin KSM masih perlu diperbaiki contohnya dalam ketepatan PS2 (Pemetaan Swadaya) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kurang tepat sasaran yang dilihat dari PS2 sedangkan RAB kurang tepat item-item, jadi ya itu tidak tepatnya administrasi waktu pun jadi terlambat”.

2. Ketepatan waktu dalam pencairan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)

Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan wawancara terpilih yang penulis lakukan dilapangan banyaknya berbagai pendapat yang penulis peroleh seperti di bawah ini.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka mengenai ketepatan waktu dalam pencairan Dana BLM mengatakan bahwa :

“Pencairan dana BLM rata-rata dari pusat ke LKM tidak tepat waktu itu disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat

sendiri sehingga persyaratan yang sudah masuk itu menjadi menunggu lama, misalkan proposal dari tiap-tiap desa sudah masuk, disini tidak langsung pencairan tetapi ada proses dulu verifikasi sampai kemudian terusan dengan kebijakan anggaran di pusat yang disebut diva (daftar isian proyek), jadi ada jenjang sampai ketingkat pusat untuk menunggu pencairan tersebut, kemudian juga dipengaruhi oleh persyaratan-persyaratan administratif yaitu SK Satker Provinsi, SK Satker Pusat, SK PJOK kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan siklus sehingga jika siklusnya belum selesai, SK para pejabat-pejabat blm siap maka BLM bisa jadi molor atau tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan sementara klo pencairan dana BLM dari LKM ke masyarakat juga sama tidak tepat waktu orang dari atasnya aja tidak tepat apalagi ke masyarakat yang menerima manfaat”.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu anggota LKM Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding yang mengatakan bahwa :

*“Dana BLM kurang tepat waktu pencairan na, henteu sesuai dengan proposal yang diajukan, urang salaku KSM na nunggu lama pencairan, nya kagiatan na oge jadi lila dikerjakeun soalna wae nunggu dana na heula cair, ai cair ti pusat ka LKM,*

*terus ti LKM ka KSM sok lila di bikeunna, nyao tah meren di bagi-bagi heula soalna loba KSM na”.*

“(Dana BLM kurang tepat waktu pencairannya, tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, kami selaku KSM menunggu lama pencairan, itu dikegiatan juga lama untuk dikerjakan dikarenakan menunggu dana itu cair, kalo cair dari pusat ke LKM, terus dari LKM ke KSM lama juga untuk dibagiinnya, gak tau tah mungkin dibagi-bagi dulu karena disini banyak KSM”).

Adapun pernyataan masyarakat Desa Leuwikujang yang menerima manfaat dana BLM mengatakan bahwa :

*“Dana BLM mah sok telat di bikeunna ka KSM dari taun sebelum nage mun geus aya di LKM teh, komo ai taun ayeuna mah nu ngelola dana BLM malah LKM, tina balanja bahan bangunan LKM yang belanja, ai salaku KSM ayeuna mah cicing wae kumaha LKM yang belanja. Malah KSM nombok jang biaya tukang kamari da ceunah cek LKM dana na geus habis, abdi mah kesel ka LKM yang ngelola jadi teu paruguh kieu dikelola ku LKM teh malah kakurangan biaya, padahal dina anggaran na mah masih ada buat bayar tukang”.*

“Dana BLM suka telat dikasihinna ke KSM dari tahun sebelum-sebelumnya kalo udah ada di LKM, tahun sekarang yang ngelola

dana BLM itu LKM, dari belanja bangunan LKM yng belanja, kalo selaku KSM kita sekarang diem aja gimana KSM yang belanja. Malah KSM nombok buat biaya tukang kemarin, minta ke LKM katanya habis, saya mah kesel ke LKM malah jadi kakurangan biaya, padahal dina anggaran masih ada buat bayar tukang”.

Menurut LKM Desa Heuleut mengatakan bahwa :

“Dana BLM emang telat dari tahun ketahun juga gak tau kenapa bisa telat”.

### 3. Kecepatan pegawai dalam bekerja

Menurut anggota LKM Desa Leuwikujang mengatakan bahwa :

“Tim fasilitator PNPM Kecamatan Leuwimunding dalam pendampingan masyarakat cukup bagus, namun dalam hal tertentu TIMFAS dalam penyelesaian administrasi kegiatan kurang tepat waktu, mungkin karena terlalu banyak kegiatan atau kenapa”.

Hal tersebut didukung oleh Senior Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka yang menyatakan bahwa :

“Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan begitu banyak kegiatan salah satunya pembangunan, dari tiap kegiatan harus menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari masing-masing

kegiatan, disini dalam penyelesaian pembuatan sedikit molor dikarenakan kita tim fasilitator menyelesaikan pelaksanaan terlebih dahulu walaupun seharusnya kegiatan selesai laporan selesai”.

Adapun menurut Koordinator LKM Desa Leuwikujang mengatakan bahwa :

“Dalam pendampingan tim PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ke LKM saya rasa cukup, disini cuma kurang tanggap aja dalam pekerjaannya misalnya kita butuh bantuan dampingan dalam mengerjakan pekerjaan contohnya bantuin koreksi proposal, dari tim PNPM sendiri kurang cepat datang ke desa nya malah yang ada kita yang harus cari fasilitatornya biar cepet beres kalo enggak gitu ya gak bakal datang-dateng”.

Menurut Senior Fasilitator sendiri mengatakan bahwa :

“Kita kerja satu tim sebisa mungkin tiap hari kita turun kelapangan kita mendampingi masyarakat karena tupoksi kita yaitu pendampingan tiap-tiap desa kalo kurang cepat dalam bekerja itu karena kita pendampingan banyak desa/kelurahan sementara tenaga fasilitator terbatas, jadi bukan karena kita kurang cepat dalam bekerja tapi karena kurangnya tenaga kerja aja”.

## **2. Pencapaian Target atau Hasil : Pencapaian sasaran**

Pelaksanaan suatu program PNPM tidak terlepas dari pencapaian target atau hasil, tanpa adanya hasil berarti program tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

Pencapaian target atau hasil adalah segala bentuk satuan ukuran yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran pencapaian program. Pelaksanaan program PNPM akan berjalan dengan lancar dan efektif apabila tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Walau kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti hal ketidakpahaman masyarakat tentang program PNPM.

Adapun yang menjadi parameter dari dimensi diatas adalah sebagai berikut :

### **1. Pencapaian tujuan dan sasaran**

Tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun tujuan khusus dalam pencapaian tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yaitu :

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan

komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Sementara sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat Masyarakat warga kelurahan/desa peserta PNPM Mandiri Perkotaan, terutama masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan wawancara terpilih yang penulis lakukan dilapangan banyaknya berbagai pendapat yang penulis peroleh seperti di bawah ini.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Kuwu Desa Leuwikujang yang mengatakan bahwa :

*“Seueur masyarakat anu teu ngarti dina program PNPM, mungkin karena kurangnya sosialisasi ti pihak program dalam memperkenalkan PNPM, masyarakat seueur nu teu paham dina sistem kerja PNPM, sementara disini hanya pihak-pihak tertentu atau aparat perangkat desa aja yang memahami sistem kerja PNPM”.*

*“(banyak masyarakat yang tidak mengerti program PNPM, mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pihak program dalam memperkenalkan PNPM, masyarakat banyak yang kurang paham pada sistem kerja PNPM, sementara disini hanya pihak-pihak tertentu atau aparat perangkat desa aja yang memahami sistem kerja PNPM)”.*

Hal tersebut didukung oleh salah satu warga Desa

Leuwikujang yang mengatakan bahwa :

*“Abdi mah teu ngarti naon eta PNPM , abdi mah orang awam neng teu terang nanaon, ngan tiasa gawe neangan duit jang pamajikan, pernah mireng aya program PNPM buat warga miskin tapi da abdi mah teu ngartos merenan eta mah jang urang-urang anu ngarti bae”.*

*“(saya mah gak ngerti apa itu PNPM, saya mah orang awam yang gak tau apa-apa, Cuma bisa cari uang buat anak istri, pernah denger ada program PNPM buat warga miskin tapi saya mah tidak mengerti mungkin itu mah untuk orang-orang yang ngerti aja)”.*

Adapun wawancara yang dilakukan dengan warga Desa Heuleut mengatakan bahwa :

*“Abdi ta can terang aya na PNPM anu ngabantu dina simpan pinjam kanggo masyarakat khususna masyarakat sapartos abdi anu kakurangan ekonomi na, abdi mah teu terang nanaon dinu aya na PNPM”.*

*“(saya belum tahu ada PNPM yang membantu di simpan pinjam kanggo masyarakat khususnya masyarakat miskin yang kekurangan ekonominya, saya tidak tahu apa-apa di program PNPM)”.*

Menurut hasil wawancara Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka mengatakan bahwa :

“Memang masyarakat Kecamatan

Leuwimunding ada saja yang tidak mengerti adanya PNPM, apalagi desa terpencil yang daerah gunung gak tau apa-apa, yang ada pihak perangkat desanya aja yang terlibat kegiatan PNPM, kadang saya juga bingung ini gimana biar masyarakat pedalaman daerah gunung ikut berpartisipasi dalam kegiatan biar bisa sedikit-sedikit perekonomian atau pembangunannya terbangun, di PNPM ada pinjaman bergulir kadang tidak nyampe kemasyarakat yang menerima manfaat atau ada neh bank yang menyediakan pinjaman tanpa agunan tapi masyarakat tidak memanfaatkannya karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat atau tidak tepat sasaran bagi warga miskin”.

## 2. Pencapaian Program

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Askot (Asisten Kota) Kabupaten Majalengka mengenai pencapaian program PNPM menyatakan bahwa :

“Pencapaian Program PNPM dari tahun 2008 sampai sekarang berdasarkan kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa kegiatan PNPM 95% untuk pembangunan infrastruktur dan 5% untuk sosial dan ekonomi. Untuk Kecamatan

Leuwimunding pencapaian programnya sendiri pembangunan infrastruktur cukup meningkat tetapi untuk sosial dan ekonomi kurang meningkat”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Senior Fasilitator yang menyatakan :

“Untuk pencapaian program pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan contohnya infrastruktur yang tidak sesuai perencanaan di lapangan, ekonomi pinjaman bergulir terjadi kemacetan, sosial contohnya perguliran domba banyak angka kematian, jadi pencapaian program tidak maksimal”.

### 3. Kualitas Kerja : mutu pekerjaan

Salah satu indikasi pegawai dikatakan efektif dalam melaksanakan pekerjaan adalah jika pegawai tersebut dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan dan kerapihan. Ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kelengkapan adalah ketelitian dalam melaksanakan tugasnya dan kerapihan adalah kehandalan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Adapun yang menjadi parameter dari dimensi diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman pegawai tentang tupoksi

Berdasarkan wawancara terpilih yang penulis lakukan dilapangan banyaknya berbagai pendapat yang penulis peroleh seperti di bawah ini.

Wawancara yang dilakukan dengan KORKAB (Koordinator Kabupaten) PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Majalengka, didapat keterangan bahwa penyelesaian pekerjaan oleh timfas PNPM Kecamatan Leuwimunding kurang sesuai dengan kualitas kerja yang diharapkan.

Hasil wawancara penulis dengan KORKAB Kabupaten Majalengka mengatakan bahwa :

“Tiap-tiap fasilitator maupun senior fasilitator diharapkan mampu memahami tupoksi masing-masing, diharapkan bisa mendampingi masyarakat khususnya masyarakat miskin guna menanggulangi kemiskinan, banyak poin-poin tugas yang harus mereka kerjakan tidak hanya dalam pembuatan LPJ tetapi juga hal lain yang menyangkut administrasi. Terkadang disini yang menjadi kendala yaitu ketidaksesuaian rencana sama pelaksanaan, banyak aduan masyarakat tentang itu, misalnya masyarakat merencanakan pembuatan jalan yang tidak sesuai volume atau dana BLM turun tidak sesuai yang direncanakan. Kendala yang kedua yaitu

timfasilitator kec. Leuwimunding tidak bisa cepat dalam bekerja”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh ASKOT Kabupaten Majalengka yang menyatakan :

“Banyak Tim fasilitator baru yang belum memahami sistem kerja PNPM, dari tiap tim ada mungkin 3 fasilitator baru yang masuk apalagi di Leuwimunding sehingga senior fasilitator sendiri kesulitan dalam menggerakkan timnya. Untuk mempelajari tupoksi dari tugas masing-masing juga perlu pemahaman, apalagi ini terjun langsung kemasyarakat. Terus di Kecamatan Leuwimunding sendiri kekurangan tenaga kerja PNPM, yang harusnya satu kecamatan mendampingi 9 desa/kelurahan, ini di Kecamatan Leuwimunding ada 14 desa dan melebihi ketentuan pendampingan”.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan Fasilitator Kecamatan Leuwimunding yang menyatakan bahwa :

“Kami disini kerja tim, kita semua paham tupoksi namun karena pendampingan kita banyak desa jadi kurang maksimal dalam bekerja, lamun cek bahasa urang mah henteu kageroh sadaya butuh waktu lama untuk pendampingan dan untuk mengenai kualitas

pembangunan infrastruktur sendiri di Kecamatan Leuwimunding sendiri cukup bagus dilihat dari fisik pembangunan tetapi masih perlu peninjauan kembali untuk lebih baik lagi”.

“(Kami disini kerja tim, kita semua paham tupoksi namun karena pendampingan kita banyak desa jadi kurang maksimal dalam bekerja, kalo menurut bahasa kitanya belum kedampingi semua, butuh waktu lama pendampingan dan untuk mengenai kualitas pembangunan infrastruktur sendiri di Kecamatan Leuwimunding sendiri cukup bagus dilihat dari fisik pembangunan tetapi masih perlu peninjauan kembali untuk lebih baik lagi”.

## 2. Memahami kebutuhan masyarakat

Memahami kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM artinya tim fasilitator bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya warga miskin.

Berdasarkan wawancara terpilih yang penulis lakukan dilapangan banyaknya berbagai pendapat yang penulis peroleh seperti di bawah ini.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Koordinator ketua LKM Desa Leuwikujang yang menyatakan bahwa :

“Kinerja PNPMM Kecamatan Leuwimunding menurut saya kurang maksimal dalam mendampingi LKM, kadang kurang begitu paham yang masyarakat mau artinya disini kami LKM kurang menyerap apa yang diinginkan masyarakat entah itu masyarakat yang belum bisa menerima manfaat PNPMM atau apa, mungkin karena saya belum bisa memahami kebutuhan masyarakat itu dan justru menghambat ke timfasilitator dalam bekerja. Kami sebagai LKM jarang diadakan pelatihan untuk pembinaan LKM untuk administratif atau apa lah, tetapi kalo masalah kerjasama antara timfas PNPMM Kecamatan Leuwimunding sama LKM mungkin bagus, ada pedulinya”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan Senior Fasilitator PNPMM Mandiri Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka mengatakan bahwa :

“Berawal dari paradigma kemiskinan itu sendiri kalo kemiskinan itu hanya dianggap sebagai persoalan ekonomi, maka tindak lanjutnya pasti pemberian modal. Namun karena PNPMM itu meyakini bahwa kemiskinan itu bukan hanya perihal finansial atau ekonomi saja tetapi juga infrastruktur dalam

hal ini kita di PNPMM memang memprioritaskan perihal infrastruktur juga salah satu contohnya saja jalan, itu untuk menghilangkan isolasi warga miskin terhadap sumber daya, dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan apabila masyarakat tidak menyerap informasi yang diberikan mungkin tidak bisa menerima manfaat, mungkin seperti itu kita memahami kebutuhan masyarakat”.

### 3. Kinerja pegawai

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ASKOT (Asisten Koordinator) Kabupaten Majalengka mengatakan bahwa :

“Di tingkat fasilitator mempunyai RKTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut) tim sebagai turunan tindak lanjut dari RKTL tim KORKAB dan merupakan master schedul nasional. Di tingkat masyarakat sendiri mereka memiliki sistem perencanaan program, rencana tahunan itu diterjemahkan ke rencana LKM. Apa yang dilakukan warga dalam rangka

merencanakan program tahunan. Disini tim fasilitator harus mampu menyelesaikan rencana dalam tiap tahunnya dan apabila RKTL tersebut tidak berjalan maka dianggap gagal”.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Koordinator ketua LKM Desa Leuwikujang yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya kinerja tim fasilitator di PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka cukup lah dalam menyelesaikan tugas, kebanyakannya sih tim fasilitator kurang tanggap dalam pendampingan”.

Menurut Senior Fasilitator PNPM Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa :

“Kami disini kerja tim dan apabila kita gak cepat dalam bekerja itu karena banyak tugas yang harus segera diselesaikan dengan cepat, apalagi kendala disini kita memegang 14 desa dampingan bukan karena kita kinerjanya kurang tapi ya itu tadi kebanyakan desa dampingan”.

#### 4. Kerjasama

Menurut hasil wawancara penulis Koordinator LKM Desa Leuwikujang mengatakan bahwa :

“Kerja sama yang dibangun antara fasilitator dengan LKM atau masyarakat cukup baik hal

ini terbukti dengan pedulinya fasilitator terhadap masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, contohnya dengan pembangunan infrastruktur yang sedikit-demi sedikit meningkat, banyak perempuan yang ikut ke kegiatan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fasilitator mengatakan bahwa :

“Tingkat kerjasama kami dengan masyarakat cukup baik walaupun banyak hambatan yang dihadapi contohnya ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana proses administrasi pembukuan, pegawai kita sebagai fasilitator mengajari sampai masyarakat mengerti dan saling kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

#### 5. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur merupakan pembangunan fisik yang 95% harus dilaksanakan dalam tiap desa / kelurahan.

Berdasarkan wawancara terpilih yang penulis lakukan dilapangan banyaknya berbagai pendapat yang penulis peroleh seperti di bawah ini.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Senior Fasilitator PNPM Mandiri Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka mengatakan bahwa :

“Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Leuwimunding cukup meningkat hal ini di karenakan sesuai kebijakan pemerintah yang menetapkan kebijakan 95% pembangunan infrastruktur harus terlaksana walaupun dalam pelaksanan masih jauh dari sempurna banyak kendala yang dihadapi contohnya dalam administratif yang terlambat dan mengakibatkan terlambatnya kegiatan”.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Leuwikujang mengatakan bahwa :

“Adanya PNPMP membantu kita dalam pembangunan desa contohnya jalan gang semakin bagus, sarana prasarana meningkat tapi kegiatan nya mungkin pembangunan infrastruktur aja yang meningkat”.

### **Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Program PNPMP di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka**

Kata kunci pengertian ini ialah kata efektif, karena pada akhirnya keberhasilan organisasi diukur dengan konsep efektivitas. Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan). Suatu efektivitas diperlukan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan berorganisasi. Di organisasi PNPMP Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

dalam pelaksanaannya perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat perlu dinilai efektif atau tidaknya tergantung dalam pelaksanaan tersebut. PNPMP Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding dalam pelaksanaannya belum efektif dilaksanakan karena ada beberapa faktor yang tidak dilaksanakan dengan baik.

Menurut pandangan penulis setelah menyimpulkan dari wawancara yang telah dilakukan dengan pihak-pihak terkait, bahwa hambatan dalam pelaksanaan PNPMP Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin, banyak masyarakat yang tidak memahami sistem kerja PNPMP.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau pegawai PNPMP dalam mendampingi masyarakat.
3. Pola administrasi yang lambat, penyelesaian administrasi yang tidak sesuai rencana yang telah ditentukan.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan program PNPMP Mandiri Perkotaan sudah dilakukan secara efektif namun belum maksimal sebab pada aspek tertentu masih ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama dilihat dari rencana kerja yang sudah dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaan. Kedua, sasaran dalam PNPMP-MP ini adalah masyarakat, namun masyarakat masih ada yang belum mengerti dan memahami sistem kerja PNPMP ini. Begitupun dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPMP-MP ini masih kurang sehingga aspek penelitian belum tepat sasaran. Yang ketiga dalam pelaksanaan PNPMP-MP kurangnya tenaga

sumber daya manusia atau pegawai PNPM itu sendiri.

2. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, penulis mengutip dari Soedjadi (2003 : 37) dengan tiga dimensi yaitu :

- a. Ketepatan waktu
- b. Pencapaian target/ hasil
- c. Kualitas kerja

Berikut ini penulis jelaskan satu persatu kesimpulan dari ketiga indikator tersebut dalam efektivitas pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

- a. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu anggaran atau dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kurang tepat waktu, karena pola administratif yang belum tepat rencana.

Adapun kesimpulan dari parameter diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan pola administrasi, masyarakat atau pun pegawai PNPM dalam melaksanakan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan,.
2. Ketepatan waktu dalam pencairan dana BLM, pencairan dana BLM dari pusat ke LKM tidak tepat waktu, itu di karenakan kebijakan yang rumit birokrasi.
3. Kecepatan pegawai dalam bekerja, pegawai PNPM dinilai cukup bagus bagi masyarakat.

- b. Pencapaian target/hasil (pencapaian sasaran)

Sasaran dalam pelaksanaan PNPM Mandiri yaitu masyarakat, sementara masyarakat di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka masih ada yang belum mengerti dan memahami sistem kerja PNPM.

Adapun kesimpulan dari parameter diatas adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran, pelaksanaan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dalam mencapai tujuan cukup maksimal ini dikarenakan adanya ketidaktepat sasaran dalam pelaksanaan.
2. Pencapaian program, pencapaian program PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka cukup mencapai program karena masih ada hambatan dalam pelaksanaan.
- c. Kualitas Kerja (Mutu pekerjaan)  
Kualitas kerja pegawai PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka cukup dalam menyelesaikan pekerjaan hal ini disebabkan masih ada kendala-kendala yang harus diperbaiki.

Adapun kesimpulan dari parameter diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman pegawai tentang tupoksi, pegawai PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka cukup memahami tupoksi, namun banyak pegawai yang tidak memahami dikarenakan pegawai baru.
2. Memahami kebutuhan masyarakat, disini pegawai PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kurang memahami kebutuhan masyarakat, artinya pegawai PNPM kurang begitu tanggap apa yang masyarakat inginkan.
3. Kinerja pegawai, kinerja pegawai cukup bagus dalam pendampingan masyarakat namun disini pegawai PNPM jarang melakukan pelatihan LKM atau dengan masyarakat.
4. Kerjasama, kerjasama antara LKM dengan Pegawai PNPM cukup adanya kerjasama.
5. Pembangunan Infrasrtuktur, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka cukup bagus namun ada hal yang perlu di perbaiki lagi dari segi sosial dan ekonominya.

#### SARAN

1. Pegawai PNPM Mandiri Perkotaan harus mengadakan lagi sosialisasi tentang program PNPM atau sistem kerja PNPM kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin.
2. Lebih ditingkatkan lagi pola administratif baik itu oleh pegawai PNPM atau LKM sendiri guna mempercepat rencana program dalam pelaksanaan.
3. Masyarakat harus lebih aktif dalam kegiatan yang diadakan PNPM Mandiri Perkotaan.
4. Sebaiknya pemerintah mempercepat anggaran guna mempercepat pelaksanaan program.
5. Pegawai PNPM Mandiri Perkotaan harus lebih giat mendampingi masyarakat khususnya LKM dalam mengerjakan suatu pembukuan.
6. Pegawai PNPM Mandiri Perkotaan harus mengadakan pelatihan-pelatihan khusus bagi LKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
7. Lebih di tingkatkan lagi kinerja dalam menyelesaikan tugas bagi pegawai PNPM dalam meningkatkan penanggulangan kemiskinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soedjadi, F.X., 2003. *Organization and Methods Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Sugiyono 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta Bandung